

KEPEMIMPINAN TRUMP, *AMERICA FIRST*, DAN NASIONALISME PERTAHANAN: RELEVANSINYA TERHADAP STRATEGI LOGISTIK DAN KEMANDIRIAN TNI

Fadjar Wahyudi Broto¹, I Ketut Bina S², Nurhidayat³, Tuwadi⁴, Tarsisius Susilo⁵

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia¹⁻⁵

Email: fadjar054@gmail.com¹ binaketutbina@gmail.com² kolhidayat123@gmail.com³
tuwadi2000@yahoo.com⁴ muchus70@gmail.com⁵

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>Kajian ini menganalisis kepemimpinan Donald Trump melalui kebijakan America First yang menekankan proteksi industri strategis, khususnya sektor pertahanan dan energi, serta relevansinya bagi Indonesia dalam membangun kemandirian logistik dan memperkuat strategi pertahanan nasional. Latar belakang penelitian ini berpijak pada orientasi proteksionis Trump yang menempatkan kepentingan domestik di atas agenda internasional, yang secara praktis memengaruhi dinamika geopolitik dan ekonomi global. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi keterkaitan antara nasionalisme sumber daya dan strategi pertahanan dalam konteks global, sekaligus merefleksikannya pada kebutuhan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memadukan data primer dari wawancara pakar serta data sekunder berupa literatur akademik, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan proteksi industri pertahanan dan energi di bawah Trump merefleksikan realisme dalam hubungan internasional, sekaligus mempertegas urgensi nasionalisme sumber daya dalam menjaga kedaulatan negara. Pendekatan America First berhasil mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap impor energi dan memperkuat kapasitas industri pertahanan domestik, meski menuai kritik terkait proteksionisme. Relevansinya bagi Indonesia terletak pada kebutuhan membangun sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri guna menghadapi dinamika ancaman kontemporer, termasuk ketergantungan pada impor alutsista, amunisi, dan energi. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan refleksi strategis bagi TNI dalam memperkuat Doktrin Pertahanan Semesta (Sishanta) dengan menekankan integrasi sumber daya nasional, kemandirian industri pertahanan, serta pengembangan sistem logistik yang resilien.</i> Kata Kunci: <i>Kepemimpinan Trump, America First, nasionalisme pertahanan, kemandirian logistik, strategi TNI</i>

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan Donald Trump dalam politik Amerika Serikat menandai era baru dalam praktik nasionalisme modern, khususnya melalui slogan *America First* yang menekankan kepentingan domestik di atas agenda internasional. Kebijakan ini terlihat jelas dalam pengelolaan industri pertahanan dan energi yang diarahkan untuk mengurangi

ketergantungan pada pihak luar, sekaligus memperkuat kapasitas nasional. Trump mendorong revitalisasi industri pertahanan dalam negeri melalui proteksi kebijakan fiskal dan pengutamaan kontrak domestik, serta mengedepankan kemandirian energi lewat eksplorasi sumber daya alam secara agresif. Orientasi ini memperlihatkan betapa erat kaitannya antara kepemimpinan politik, nasionalisme sumber daya, dan strategi pertahanan nasional. Dalam konteks global, langkah Trump memunculkan refleksi penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam menata kembali arah kebijakan pertahanan agar mampu menjawab tantangan geopolitik kontemporer.

Indonesia, dengan posisi geostrategisnya sebagai negara kepulauan yang berada di pusat jalur perdagangan dunia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Ketergantungan terhadap pasokan logistik, teknologi, dan energi dari luar negeri menjadi salah satu kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor eksternal. Oleh karena itu, relevansi studi tentang kebijakan *America First* dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam membangun kemandirian logistik dan memperkuat doktrin pertahanan nasional. Melalui refleksi atas model nasionalisme sumber daya di Amerika Serikat, Indonesia dapat meninjau ulang prioritas dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri, kemandirian energi, serta sistem logistik militer yang lebih resilien. Hal ini sejalan dengan prinsip Doktrin Pertahanan Semesta yang menekankan pentingnya kekuatan nasional yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi ancaman.

Urgensi membangun sistem logistik pertahanan yang kuat tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan militer, tetapi juga menjadi penopang bagi stabilitas nasional secara menyeluruh. Era globalisasi menghadirkan kompleksitas ancaman mulai dari kompetisi geopolitik, krisis energi, hingga dinamika keamanan regional yang membutuhkan kesiapan adaptif. Dalam situasi demikian, refleksi terhadap nasionalisme pertahanan ala Trump dapat menjadi katalis bagi Indonesia untuk menegaskan kemandirian sebagai pilar utama dalam membangun kekuatan pertahanan. Pemikiran ini menekankan bahwa kedaulatan sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh jumlah alutsista atau kekuatan pasukan, melainkan juga oleh kemampuan menjaga keberlanjutan logistik dan energi secara mandiri. Dengan demikian, kepemimpinan Trump dan kebijakan *America First* dapat diposisikan sebagai cermin untuk memperkuat relevansi kemandirian dalam doktrin pertahanan Indonesia.

➤ **Identifikasi masalah dan Research Gap**

Kebijakan *America First* yang diterapkan oleh Donald Trump telah banyak dikaji dalam konteks politik internasional dan keamanan global, namun kajian mengenai

keterkaitannya dengan nasionalisme sumber daya dan pengaruhnya terhadap refleksi pembangunan doktrin pertahanan negara lain, khususnya Indonesia, masih terbatas. Studi tentang nasionalisme pertahanan di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek kedaulatan wilayah dan modernisasi alutsista, sementara dimensi kemandirian logistik serta ketahanan energi sebagai fondasi pertahanan relatif belum dieksplorasi secara mendalam. Kesenjangan ini menimbulkan kebutuhan penelitian yang menyoroti relevansi kebijakan proteksionis dan nasionalisme sumber daya ala Trump terhadap urgensi Indonesia membangun sistem logistik pertahanan yang adaptif, mandiri, dan berkelanjutan sebagai bagian dari doktrin pertahanan nasional.

➤ **Rumusan masalah**

Bagaimana kebijakan *America First* dalam pengelolaan industri pertahanan dan energi di Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Donald Trump dapat menjadi refleksi bagi Indonesia dalam membangun kemandirian logistik dan memperkuat doktrin pertahanan TNI yang adaptif, mandiri, serta sesuai dengan dinamika ancaman kontemporer?

➤ **Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan *America First* di bawah kepemimpinan Donald Trump, khususnya dalam pengelolaan industri pertahanan dan energi, serta merefleksikan relevansinya terhadap pembangunan doktrin pertahanan Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengisi kesenjangan teoritis terkait hubungan antara nasionalisme sumber daya dengan strategi pertahanan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi TNI dalam memperkuat kemandirian logistik, energi, dan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan akademis untuk memperkaya literatur tentang pertahanan nasional, hubungan internasional, serta kebijakan publik yang terintegrasi dengan kebutuhan strategis Indonesia di tengah dinamika global.

➤ **Manfaat penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan perspektif baru tentang keterkaitan antara nasionalisme sumber daya dan strategi pertahanan. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi TNI dalam membangun sistem logistik dan kemandirian pertahanan yang adaptif terhadap ancaman kontemporer. Sementara itu, dalam ranah kebijakan publik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada perumusan kebijakan energi, industri pertahanan, dan logistik nasional yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kemandirian,

sehingga mendukung kedaulatan negara serta memperkuat stabilitas keamanan nasional Indonesia.

Landasan Teori dan Telaah Pustaka

a. Teori

1) Teori Besar (*Grand Theory*): Realisme dalam Hubungan Internasional

Teori Realisme dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau pada tahun 1948 melalui karya klasiknya *Politics Among Nations*. Realisme menekankan bahwa negara adalah aktor utama yang selalu mengejar kepentingan nasional, terutama keamanan dan kekuasaan, dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam konteks kepemimpinan Donald Trump, kebijakan *America First* merefleksikan pandangan realistis yang mengutamakan kepentingan nasional domestik, termasuk kemandirian energi dan pertahanan. Relevansinya bagi Indonesia terletak pada dorongan untuk membangun kemandirian doktrin pertahanan dan logistik TNI, agar tidak terlalu bergantung pada pasokan luar negeri dalam menghadapi dinamika ancaman global.

2) Teori Antara (*Middle Range Theory*): Geopolitik Ratzel dan Mackinder. Friedrich Ratzel (1897) dan Halford Mackinder (1904) dikenal sebagai pencetus teori geopolitik yang menekankan hubungan erat antara ruang geografis, sumber daya, dan kekuatan negara.² Menurut Mackinder, siapa yang menguasai Heartland akan menguasai dunia, sedangkan Ratzel melihat negara sebagai “organisme” yang hidup dari sumber daya wilayahnya. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan karena letak geografis strategis dan kekayaan sumber daya alam harus dijaga sebagai penopang kemandirian pertahanan. Kebijakan Trump yang menekankan nasionalisme energi dan pertahanan menunjukkan pentingnya kontrol negara terhadap sumber daya untuk menopang strategi pertahanan nasional.

3) Teori Terapan (*Applied Theory*): Filsafat Pertahanan Semesta Indonesia (Sishanta). Filsafat Pertahanan Semesta merupakan doktrin pertahanan nasional Indonesia yang menekankan keterlibatan seluruh sumber daya, baik manusia maupun alam, dalam menjaga kedaulatan negara. Konsep ini lahir dari akar pemikiran geopolitik Nusantara yang menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tantangan kompleks. Teori ini relevan dengan penelitian karena mengaitkan refleksi dari kebijakan *America First* Trump terhadap urgensi memperkuat kemandirian logistik dan energi dalam sistem pertahanan Indonesia. Dengan mengintegrasikan sumber daya nasional ke dalam strategi pertahanan, Sishanta memberikan kerangka nyata untuk membangun kemandirian TNI di era kompetisi global.

b. Penjelasan konsep-konsep utama

- 1) Kepemimpinan Trump. Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat, dikenal dengan gaya kepemimpinan populis, pragmatis, dan transaksional. Karakter kepemimpinannya menekankan keputusan cepat, retorika nasionalistik, serta penekanan pada kepentingan domestik dibandingkan multilateralisme. Dalam praktik politik luar negeri dan pertahanan, Trump sering menggunakan pendekatan deal-making yang menempatkan keuntungan nasional di atas komitmen global. Kepemimpinannya memperlihatkan pergeseran signifikan dari tradisi internasionalisme liberal AS menuju kebijakan proteksionis yang menekankan revitalisasi industri dalam negeri, khususnya energi dan pertahanan. Konsep ini penting karena menjadi fondasi kebijakan *America First* yang secara langsung memengaruhi strategi nasionalisme sumber daya.
- 2) Kebijakan *America First*. *America First* merupakan kebijakan strategis yang menjadi doktrin utama pemerintahan Trump sejak 2017, menekankan prioritas kepentingan domestik AS di atas keterlibatan internasional. Prinsip ini mencakup proteksi terhadap industri dalam negeri, pengetatan perdagangan, pengurangan ketergantungan energi asing, serta penguatan industri pertahanan nasional. Dalam bidang pertahanan, kebijakan ini mendorong alokasi anggaran militer besar-besaran dan preferensi pada kontraktor domestik. Implikasinya bagi negara lain, termasuk Indonesia, adalah dorongan untuk melihat kembali pentingnya kemandirian pertahanan dan logistik, agar tidak mudah dipengaruhi oleh dinamika global yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan nasional.
- 3) Nasionalisme. Nasionalisme merupakan konsep politik yang menekankan identitas, kedaulatan, serta kepentingan suatu bangsa sebagai prioritas utama. Teori nasionalisme modern banyak dipengaruhi oleh pemikir seperti Ernest Gellner (1983) yang menekankan keterkaitan nasionalisme dengan pembangunan ekonomi dan politik. Dalam konteks pertahanan, nasionalisme diwujudkan melalui penguatan kontrol negara terhadap sumber daya vital, kemandirian industri pertahanan, dan konsolidasi masyarakat dalam mendukung keamanan nasional. Bagi Indonesia, nasionalisme pertahanan bermakna bahwa strategi keamanan negara harus bertumpu pada kekuatan sendiri, baik dalam aspek logistik, energi, maupun kemampuan militer, tanpa ketergantungan berlebih pada pihak luar.
- 4) Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional untuk menghadapi ancaman

terhadap kedaulatan. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan dalam Doktrin Pertahanan Semesta (Sishanta), yang menekankan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam membangun kekuatan pertahanan. Pertahanan negara mencakup aspek militer, non-militer, logistik, energi, hingga diplomasi pertahanan. Dalam konteks global, pergeseran geopolitik dan munculnya ancaman non-tradisional menuntut pertahanan negara yang adaptif serta berbasis pada kemandirian sumber daya. Relevansinya dengan penelitian ini adalah urgensi memperkuat sistem logistik pertahanan Indonesia dengan merujuk pada pelajaran dari kebijakan *America First*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena kebijakan *America First* pada masa kepemimpinan Donald Trump serta relevansinya bagi strategi kemandirian logistik dan doktrin pertahanan Indonesia. Studi kasus dipilih karena mampu menggali keterkaitan antara faktor politik, ekonomi, energi, dan pertahanan dalam konteks spesifik, sekaligus menghubungkannya dengan refleksi bagi Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data berdasarkan kerangka teori

- 1) Realisme (Grand Theory). Hasil wawancara dengan pakar pertahanan menunjukkan bahwa kebijakan *America First* Trump menekankan prioritas keamanan nasional melalui penguatan industri pertahanan domestik dan pengurangan keterlibatan internasional. Hal ini sejalan dengan teori realisme Hans J. Morgenthau yang menyatakan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dalam sistem internasional yang anarkis. Dokumen resmi seperti National Security Strategy (2017) mempertegas orientasi proteksionis tersebut. Bagi Indonesia, literatur akademik menegaskan bahwa refleksi dari realisme Trump relevan untuk memperkuat doktrin pertahanan dengan menitikberatkan pada kemandirian logistik dan penguasaan sumber daya strategis demi menjaga kedaulatan.
- 2) Geopolitik Ratzel dan Mackinder (Middle Range Theory). Data dari arsip kebijakan energi AS menunjukkan eksplorasi agresif sumber daya domestik yang sejalan dengan pandangan Ratzel bahwa negara ibarat organisme yang bergantung pada ruang dan sumber daya. Mackinder menegaskan pentingnya penguasaan wilayah strategis untuk mempertahankan hegemoni global. Analisis literatur akademik memperlihatkan bahwa

America First menghidupkan kembali prinsip geopolitik ini melalui upaya AS mengurangi ketergantungan pada energi asing. Relevansinya bagi Indonesia, menurut wawancara pakar, adalah perlunya mengoptimalkan posisi geopolitik maritim dan potensi energi domestik sebagai basis kemandirian pertahanan serta pilar logistik nasional TNI.

- 3) Pertahanan Semesta (Applied Theory). Konsep Pertahanan Semesta (Sishanta) menekankan pemanfaatan seluruh potensi bangsa, baik sumber daya manusia maupun alam, untuk membangun kekuatan pertahanan. Analisis doktrin pertahanan Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya optimal dalam dimensi kemandirian logistik dan energi. Refleksi dari kebijakan Trump, berdasarkan laporan think-tank dan hasil wawancara akademisi, memperlihatkan pentingnya kontrol negara terhadap industri strategis untuk memperkuat ketahanan pertahanan. Dengan menerapkan Sishanta dalam konteks modern, Indonesia dapat membangun sistem logistik militer yang adaptif dan mandiri, sekaligus memadukan nasionalisme sumber daya dengan strategi pertahanan jangka panjang.

Analisis Temuan Utama (ringkasan kritis)

- 1) Kebijakan Trump dalam memprioritaskan kepentingan nasional AS melalui proteksi industri pertahanan dan energi. Kebijakan Donald Trump selama masa kepemimpinannya menegaskan pola pikir proteksionis yang kental dalam mengelola industri strategis, khususnya di sektor pertahanan dan energi. Dengan slogan “Make America Great Again”, Trump mengupayakan kebijakan yang menekankan penguatan kapasitas domestik, meminimalisasi ketergantungan pada impor, serta melindungi perusahaan dalam negeri dari kompetisi asing. Hal ini diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari tarif tinggi terhadap produk impor hingga dorongan insentif bagi perusahaan pertahanan dan energi lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlangsungan kedaulatan suatu negara sangat erat kaitannya dengan kemampuan mandiri dalam mengelola industri vitalnya.

Selain itu, kebijakan proteksi Trump memperlihatkan bagaimana industri pertahanan diposisikan sebagai tulang punggung kedaulatan nasional. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global, AS menilai bahwa dominasi militer tidak bisa dipisahkan dari kekuatan industri pertahanan. Kebijakan pengadaan alutsista diarahkan pada produksi dalam negeri untuk memastikan kendali penuh atas rantai pasok pertahanan. Langkah ini memperkuat basis industri pertahanan Amerika sekaligus membuka ruang

bagi inovasi teknologi militer. Dalam konteks energi, Trump juga menekankan energy independence dengan memperluas eksplorasi sumber energi domestik seperti minyak dan gas shale, sehingga menurunkan kerentanan AS terhadap dinamika pasokan global. Dari sudut pandang strategis, kebijakan proteksi ini memiliki implikasi jangka panjang bagi stabilitas nasional AS. Dengan mengurangi ketergantungan pada mitra luar negeri, AS mampu meminimalkan risiko gangguan pasokan logistik pertahanan dan energi, yang kerap menjadi titik rawan dalam konflik berskala besar. Kebijakan ini juga menegaskan peran negara sebagai regulator sekaligus fasilitator utama dalam menjaga kesinambungan sektor strategis. Meski di satu sisi memicu kritik terkait praktik proteksionisme dan potensi memicu perang dagang, langkah tersebut dianggap penting demi melindungi kepentingan nasional.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menyuguhkan pelajaran strategis tentang pentingnya intervensi negara dalam menjaga kedaulatan pertahanan. Indonesia, yang selama ini masih menghadapi ketergantungan signifikan terhadap impor alutsista dan bahan bakar, dapat belajar dari kebijakan proteksi Trump. Intervensi kebijakan yang terarah dapat mendorong tumbuhnya industri pertahanan dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi energi nasional, dan pada akhirnya memperkuat otonomi strategis. Dengan kata lain, strategi proteksi yang diterapkan AS dapat menjadi cermin bagi Indonesia dalam merancang kemandirian logistik pertahanan di era modern.

- 2) Pendekatan *"America First"* dalam pengelolaan industri pertahanan dan energi AS. Pendekatan *"America First"* yang digaungkan oleh Donald Trump tidak hanya sekadar slogan politik, tetapi bertransformasi menjadi doktrin nasional yang berorientasi pada kepentingan domestik. Dalam konteks industri pertahanan, kebijakan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pengadaan, investasi, dan riset harus berlandaskan pada kepentingan AS semata. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan anggaran pertahanan, penguatan kontrak dengan perusahaan lokal, serta pengendalian ketat terhadap alih teknologi. Tujuannya adalah memastikan supremasi militer AS tetap terjaga sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem persenjataan asing.

Dalam sektor energi, *"America First"* memprioritaskan eksplorasi dan produksi domestik dengan target menjadikan AS sebagai eksportir energi bersih. Kebijakan ini didorong oleh pandangan bahwa ketahanan energi merupakan faktor fundamental bagi ketahanan nasional. Dengan memperluas eksplorasi sumber daya minyak, gas, dan batubara dalam negeri, Trump berusaha memutus ketergantungan terhadap impor energi, terutama dari

kawasan rawan konflik. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi domestik, tetapi juga menambah fleksibilitas geopolitik AS dalam menentukan sikap terhadap negara-negara produsen energi dunia.

Dari perspektif internasional, pendekatan ini menimbulkan pergeseran dinamika dalam perdagangan global, khususnya di bidang energi dan persenjataan. AS yang lebih menutup diri terhadap perdagangan bebas menciptakan ketidakseimbangan bagi negara lain yang bergantung pada pasar Amerika. Kebijakan *"America First"* juga memicu ketegangan dengan sekutu tradisional, karena mengedepankan kepentingan nasional di atas komitmen multilateral. Meski demikian, langkah ini justru memperlihatkan konsistensi AS dalam memandang bahwa kepentingan nasional tidak boleh dikompromikan oleh aturan global yang dinilai merugikan.

Bagi Indonesia, pendekatan ini menunjukkan urgensi untuk menata ulang strategi pengelolaan industri pertahanan dan energi. Indonesia dapat belajar bahwa kepentingan nasional harus menjadi landasan utama setiap kebijakan, termasuk dalam hal alih teknologi, investasi asing, dan pengembangan sumber daya energi. Dengan mengadopsi semangat *"America First"* yang disesuaikan dengan konteks domestik, Indonesia dapat memperkuat basis industri pertahanan dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal. Hal ini akan berkontribusi pada kemandirian strategis sekaligus mendukung doktrin pertahanan nasional.

- 3) Urgensi Indonesia membangun sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri. Pengalaman kebijakan AS di bawah Trump memberikan refleksi penting bagi Indonesia, khususnya dalam pembangunan sistem logistik pertahanan. Indonesia menghadapi tantangan kompleks berupa ketergantungan impor alutsista, keterbatasan infrastruktur logistik, serta kerapuhan dalam penyediaan energi pertahanan. Hal ini dapat menjadi kerentanan strategis ketika menghadapi konflik atau krisis global. Oleh karena itu, pembangunan sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri harus menjadi agenda prioritas dalam kebijakan nasional.

Sistem logistik pertahanan yang kuat tidak hanya berfokus pada ketersediaan alutsista, tetapi juga mencakup ketahanan energi, infrastruktur transportasi militer, serta jaringan distribusi yang terintegrasi. Adaptivitas menjadi kunci dalam menjawab dinamika ancaman modern yang bersifat cepat dan tidak terduga. Dengan sistem yang responsif, TNI dapat memastikan kesiapan operasional dalam berbagai skenario, mulai dari perang konvensional hingga ancaman non-tradisional. Mandiri di sini berarti mengurangi

ketergantungan pada pihak luar, terutama dalam hal pasokan senjata, amunisi, dan energi strategis.

Selain itu, pembangunan sistem logistik pertahanan yang adaptif membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri pertahanan, dan lembaga riset nasional. Dukungan negara berupa regulasi, insentif fiskal, serta investasi riset menjadi fondasi untuk memperkuat kemandirian logistik. Indonesia dapat mengadopsi pola kolaborasi pentahelix, yaitu integrasi antara akademisi, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan media, guna memperkuat ekosistem pertahanan. Dengan demikian, logistik pertahanan tidak hanya menjadi urusan militer, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional.

Urgensi ini semakin relevan dengan perkembangan geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Ketergantungan pada impor dapat menjadi titik lemah dalam menghadapi embargo, krisis energi, atau konflik berskala besar. Dengan membangun sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri, Indonesia dapat memperkuat implementasi Doktrin Pertahanan Negara yang menekankan pada kemandirian dan daya tangkal. Pada akhirnya, hal ini akan memastikan bahwa Indonesia mampu menjaga kedaulatan, menghadapi ancaman eksternal, serta menopang stabilitas nasional dalam jangka panjang.

Implikasi Strategis bagi Indonesia

Kebijakan proteksionis Trump dan doktrin *America First* menunjukkan bahwa kemandirian di sektor pertahanan dan energi merupakan fondasi utama bagi stabilitas nasional. Bagi Indonesia, hal ini menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista, amunisi, dan bahan bakar. Pembangunan industri pertahanan dalam negeri, didukung dengan riset dan pengembangan teknologi, menjadi jalan untuk memperkuat kapasitas logistik militer. Selain itu, diversifikasi sumber energi domestik dapat memperkecil kerentanan Indonesia terhadap fluktuasi pasar global atau embargo yang dapat melemahkan daya tangkal pertahanan nasional.

Implikasi lain adalah kebutuhan untuk memperkuat integrasi lintas sektor antara pemerintah, BUMN pertahanan, sektor swasta, dan akademisi. Pengalaman AS menunjukkan bahwa keberhasilan membangun kemandirian logistik dan energi memerlukan kebijakan terpusat dengan dukungan politik yang kuat. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa melalui regulasi, insentif fiskal, dan penguatan ekosistem industri strategis. Dengan demikian, kemandirian pertahanan tidak hanya menjadi agenda militer, tetapi juga menjadi pilar pembangunan nasional yang berorientasi pada ketahanan jangka panjang.

Relevansi terhadap Kebijakan Pertahanan dan Strategi Militer TNI

Relevansi utama bagi Indonesia adalah bagaimana TNI harus menyesuaikan doktrin dan strategi militernya dengan kondisi logistik yang lebih mandiri. Dengan sistem pertahanan yang berbasis pada kemandirian industri, TNI dapat mengurangi risiko operasional yang muncul akibat ketergantungan pada rantai pasok luar negeri. Hal ini sangat penting dalam skenario konflik atau embargo, di mana akses terhadap alutsista dan energi impor bisa terganggu. Kemandirian logistik juga akan meningkatkan kecepatan respons TNI dalam menghadapi ancaman konvensional maupun non-konvensional.

Lebih jauh, kebijakan pertahanan Indonesia dapat memperkuat postur TNI melalui transformasi strategi pembangunan kekuatan militer. Strategi ini mencakup pembangunan infrastruktur logistik nasional, peningkatan cadangan energi militer, dan integrasi sistem distribusi yang adaptif. Dengan dukungan kemandirian pertahanan, TNI akan lebih leluasa dalam menerapkan doktrin Pertahanan Semesta, yang menekankan sinergi seluruh komponen bangsa. Pada akhirnya, relevansi kebijakan ini memastikan bahwa TNI tidak hanya kuat secara taktis, tetapi juga memiliki daya tahan strategis untuk menjaga kedaulatan negara dalam jangka panjang.

Alternatif Solusi/Rekomendasi

Alternatif solusi yang dapat ditempuh Indonesia dalam menghadapi tantangan kemandirian pertahanan dan logistik adalah membangun strategi terpadu yang menggabungkan aspek kebijakan, industri, dan teknologi. Pertama, dari sisi kebijakan, pemerintah perlu menyusun grand strategy pertahanan yang menempatkan kemandirian logistik sebagai pilar utama. Strategi ini harus diwujudkan melalui regulasi yang melindungi industri pertahanan domestik, insentif fiskal untuk investasi teknologi, serta kebijakan energi yang berorientasi pada ketersediaan cadangan strategis bagi kebutuhan militer.

Kedua, dari sisi industri, Indonesia harus memperkuat BUMN pertahanan sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra internasional yang relevan. Pengembangan alutsista dan amunisi dalam negeri harus difokuskan pada transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta pengembangan *dual-use technology* yang dapat mendukung kebutuhan militer sekaligus kebutuhan sipil. Di sektor energi, diversifikasi sumber energi baik fosil, terbarukan, maupun energi alternatif perlu dipercepat agar sistem logistik pertahanan tidak terjebak pada ketergantungan tunggal.

Ketiga, dari sisi teknologi, riset dan inovasi menjadi kunci. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi strategis antara TNI, lembaga penelitian, dan universitas dalam menciptakan

teknologi pertahanan modern. Pemanfaatan kecerdasan buatan, sistem komunikasi taktis, dan teknologi logistik cerdas harus diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan operasional.

Akhirnya, solusi ini hanya akan efektif jika didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat dan konsisten, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pertahanan. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat membangun sistem logistik pertahanan yang adaptif, mandiri, dan mampu menjamin kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman di masa depan.

D. KESIMPULAN

Kepemimpinan Donald Trump dengan kebijakan *America First* menegaskan pentingnya nasionalisme pertahanan melalui proteksi industri strategis, khususnya energi dan pertahanan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan realisme dalam politik internasional, di mana kepentingan domestik ditempatkan di atas komitmen global. Revitalisasi industri pertahanan dan eksplorasi energi domestik yang ditekankan Trump bertujuan untuk mengurangi ketergantungan eksternal sekaligus memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman global. Hal ini memperlihatkan bagaimana kepemimpinan politik dapat menjadi katalis dalam membangun kemandirian logistik dan daya tangkal nasional.

Bagi Indonesia, refleksi dari *America First* memiliki relevansi strategis yang signifikan. Ketergantungan pada impor alutsista, energi, dan teknologi logistik masih menjadi kerentanan serius dalam menjaga kedaulatan. Dengan belajar dari pendekatan Trump, Indonesia dapat menegaskan kembali urgensi membangun sistem logistik pertahanan yang kuat, adaptif, dan mandiri. Implementasi Doktrin Pertahanan Semesta (Sishanta) dapat diperkuat melalui integrasi sumber daya nasional, sinergi lintas sektor, serta dorongan inovasi teknologi pertahanan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat postur TNI, tetapi juga memastikan daya tahan strategis dalam menjaga stabilitas nasional.

Kesimpulannya, kepemimpinan Trump melalui *America First* menjadi cermin penting bagi Indonesia untuk memperkuat nasionalisme pertahanan dengan menekankan kemandirian logistik. Hal ini bukan sekadar pilihan strategis, melainkan kebutuhan mendesak agar TNI mampu menghadapi kompleksitas ancaman global secara otonom, berkelanjutan, dan berdaulat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Brands, H. (2018). American grand strategy in the age of Trump. Brookings Institution Press.
- Campbell, K. M., & Sullivan, J. (2019). Competition without catastrophe: How America can both challenge and coexist with China. *Foreign Affairs*, 98(5), 96–110.
- Gellner, E. (1983). Nations and nationalism. Blackwell.
- Gindarsah, I., & Priamarizki, A. (2020). Indonesia's defense diplomacy: Harnessing the hedging strategy in the Indo-Pacific. *RSIS Working Paper*, 320, 1–33.
- Kurlantzick, J. (2019). Trump's foreign policy legacy. *Council on Foreign Relations Report*, 1–14.
- Mackinder, H. J. (1904). The geographical pivot of history. *The Geographical Journal*, 23(4), 421–437.
- Mead, W. R. (2017). The Jacksonian revolt: American populism and the liberal order. *Foreign Affairs*, 96(2), 2–7.
- Morgenthau, H. J. (1948). Politics among nations: The struggle for power and peace. Alfred A. Knopf.
- Prawira, M. Y. (2021). Kemandirian industri pertahanan Indonesia: Tantangan dan prospek dalam mewujudkan ketahanan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(1), 75–92.
- Prakoso, A. S., & Darmawan, R. (2022). Logistik pertahanan sebagai pilar kemandirian TNI: Analisis kebutuhan dan strategi penguatan. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 8(2), 113–130.
- Ratzel, F. (1897). *Politische Geographie*. Oldenbourg.
- Suryadinata, L. (2020). National resilience and defense policy of Indonesia in the Jokowi era. *ISEAS Perspective*, 43, 1–12.
- Trump, D. J. (2017). National security strategy of the United States of America. The White House.
- Woodward, B. (2018). Fear: Trump in the White House. Simon & Schuster.
- Yusgiantoro, P. (2020). Ekonomi pertahanan: Teori dan praktik. Gramedia Pustaka Utama.